



**SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 139/WN/X-XIII.05/06/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Undangan Workshop Nasional**

Jakarta, 05 Juni 2021

Kepada Yth,-
Bapak. H. Erman Safar, SH
Walikota Bukittinggi
Di,-
T e m p a t,-

BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, serta kredibel untuk berperan aktif atau mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara bergeser dari *assurance* yang lebih condong pada administrasi pengelolaan keuangan negara menuju *assurance* pada capaian substansi (outcome dan dampak) atas program pembangunan. Ke depan, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK diharapkan menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. BPK melakukan audit secara menyeluruh untuk mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Di masa pandemi pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pola yang tidak biasa. Sebab, penanganan pandemi tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Pihak yang memiliki kewajiban mengelola keuangan negara tetap perlu melakukan tugasnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut merupakan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Oleh sebab itu dilakukan yang disebut dengan risk based comprehensive audit secara menyeluruh. Upaya yang juga dilakukan BPK untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah menggandeng Kejaksaan dan Polri. Kerjasama dilakukan dengan kedua aparat penegak hukum tersebut diantaranya terkait pertukaran data dan informasi hingga pemeriksaan investigatif. Termasuk juga terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara atau daerah dan unsur pidana. Akuntabel berarti bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada hasil.

Kondisi lingkungan di masa penanggulangan Covid 19, menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan berbagai prosedur alternatif dan penggunaan teknologi informasi. Dalam konteks kali ini ada hal berbeda, dimana Covid 19 memberikan sejumlah batasan kepada kita untuk melaksanakan pemeriksaan tetapi tetap sesuai dan tunduk kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) hal tersebut menjadi tantangan BPK ke depan agar bisa menjalankan pemeriksaan penanggulangan Covid 19 dengan cara yang baik dan benar. Tentunya yang tidak diinginkan adalah para auditee mengelabui auditor dengan alasan Covid 19, apalagi menjadikan situasi ini yang membuat auditee merasa senang, karena pemeriksaan yang dianggap tidak akan pernah maksimal. Selain itu juga di masa penanggulangan pandemi Covid 19 risiko integritas (berupa kecurangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang) juga meningkat, yang dapat merugikan keuangan negara. Risiko integritas ini, penyelenggara negara memanfaatkan situasi fraud untuk kepentingan politik. Inilah yang disebut aji mumpung karena dianggap kejadian luar biasa, sehingga permisif seorang akan diuji, apakah ini dijalankan sebagai temuan atau ini bagian dari hal yang biasa. Pencapaian cita-cita bernegara tersebut akan dicapai dengan dibentuknya pemerintahan dengan semua perangkat yang ada untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan misi BPK dilakukan dengan menetapkan tujuan strategis yang teridentifikasi dari isu-isu strategis serta dengan memperhatikan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh BPK kepada negara dan bangsa Indonesia.

Dengan diselenggarakan Workshop Nasional dua hari melalui Sekretariat Jenderal C.Q Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) diharapkan akan mendapat arahan menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat serta kami mengundang untuk mendapatkan *insight* dari para *stakeholders* Sekretariat Daerah, Dinas - Dinas, Lembaga Teknis yang terkait. Pemerintahan Daerah dalam menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta menerapkan prinsip tata pemerintahan yang efektif, adil (equitable), jujur, transparan, dan akuntabel.



**SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

B. Tema Workshop

Dalam workshop nasional dua hari ini dengan mengambil tema “**Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Covid 19 Skema, Risiko dan Mitigasinya, Serta Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK**”. Yang dapat ditinjau dari berbagai bidang: Pemeriksa Keuangan, Pemerintahan Daerah, Perekonomian, Keuangan, Kabinet, Perencanaan Pembangunan, Legislatif, Akademisi Hukum dan Ekonomi.

C. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Rabu s.d Kamis, 07 – 08 Juli 2021
Jam : 08.00 – 13.15 / 08.00 –14.45 WIB (Selesai)
Tempat : Hotel Grand Sahid Jakarta (Puri Agung Ballroom)
Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat 10220
Dress code hari pertama pakaian batik dan wanita menyesuaikan
Hari kedua pakaian bebas dan menjalankan standar protokol kesehatan covid 19

D. Peserta dan Biaya

Biaya kontribusi peserta kegiatan Workshop Nasional sebesar **Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel/Penginapan, Ruang Meeting, Coffee Break, Perlengkapan Workshop, Narasumber, Dokumentasi Kegiatan, Penggandaan Materi, dan Konsumsi selama kegiatan.

Pembayaran kontribusi kegiatan dapat di transfer ke **Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No : 139-501-003-473-506 Bendahara Panitia Badiklat PKN – ISEI a.n. Rahmansyah SE Kantor Cabang Taman Mini Indonesia Indah Jakarta**. Panitia tidak melayani penerimaan pembayaran biaya kontribusi peserta di tempat registrasi dan pengisian daftar hadir / absensi peserta. Sesuai kesepakatan bersama pembayaran hanya dilakukan dengan sistem transaksi secara non tunai.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **Sekretariat Jenderal – Badiklat PKN.**
Drs. Agus Pramono, SE, HP 0811185587 / 08111504566 (Whatsapp)
Ir. Heru Soedjatmiko, MA HP 0811555735
Humas fax. 021 – 79170325 / 021 – 79190728

Pelaksanaan kegiatan Workshop Nasional dua hari pembayaran biaya kontribusi peserta di audit Lembaga Independent Price Waterhouse Coopers Indonesia.

Demikian kami sampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**Sekretaris Jenderal
Cq. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI**



**Dra. Ida Sundari, MM, CSFA
NIP 196104081980032001**

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPK RI.
2. Yth. Sekretaris Jenderal BPK RI



**SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

JADWAL WORKSHOP NASIONAL KERJASAMA BADIKLAT PKN – ISEI

**S e s i I R a b u , 07 J u l i 2021
Hotel Grand Sahid Jakarta, Puri Agung Ballroom
Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat 10220**

**TEMA : Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Covid 19 Skema, Risiko dan Mitigasinya,
Serta Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK**

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Tim Penerima Tamu	Hotel Grand Sahid Jakarta, Puri Agung Ballroom
09.00 – 09.15	Pembukaan Workshop	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Badiklat PKN BPK RI	Dra. Ida Sundari, MM, CSFA	
09.25 – 09.40	Keynote Speech dan Pembuka Workshop	Ketua BPK RI Dr. Agus Firman S., SE, M.Si	
09.40 – 09.55	C O F F E E B R E A K		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif Menjaga dan Memperbaiki Koordinasi, Sinkronisasi, Penyusunan Kebijakan, Serta Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian: Ir. Airlangga Hartarto, M.BA (Menteri Perekonomian Republik Indonesia) 2. Perspektif Pengelola Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah Berkelas Dunia Yang Adil dan Transparan : Drs. Astera Primanto Bhakti, M. Tax (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI) 3. Perspektif Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan: Drs. Akmal Malik M.Si (Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) 4. Perspektif Hukum Ekonomi Pentingnya Pengambilan Kebijakan Dalam Pandangan Hukum Ekonomi: Prof. Dr. Adi Sulistyono (Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Negeri Surakarta) 5. Perspektif DPR RI Dalam Menyerap Aspirasi Daerah Untuk Sinkronisasi Keputusan Dengan Pemerintah Pusat: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia T, S.Si, MT (Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)	Moderator: Pengamat Pengawasan Keuangan Dr. Enny Sri Hartati, S.Ak, M.Si	Hotel Grand Sahid Jakarta, Puri Agung Ballroom
12.45 – 13.15	Diskusi dan Tanya Jawab		
13.15	Selesai		



**SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

JADWAL WORKSHOP NASIONAL KERJASAMA BADIKLAT PKN - ISEI

S e s i I I K a m i s, 0 8 J u l i 2 0 2 1
Hotel Grand Sahid Jakarta, Puri Agung Ballroom
Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat 10220

**TEMA : Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Covid 19 Skema, Risiko dan Mitigasinya,
Serta Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK**

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Penerimaan Peserta	Tim Penerima Tamu	Hotel Grand Sahid Jakarta, Puri Agung Ballroom
09.00 – 09.15	Pembukaan Workshop	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Kepala Badiklat PKN BPK RI	Dra. Ida Sundari, MM, CSFA	
09.25 – 09.40	Keynote Speech dan Pembuka Workshop	Sekretaris Jenderal BPK RI Bahtiar Arif, SE, M.Fin	
09.40 – 09.55	C O F F E E B R E A K		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif Melaksanakan Misi Pemerintahan Dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Yang Berkualitas: Dr. Yuli Harsono, SH, LL.M (Deputi Bidang PMK Seskab RI) 2. Perspektif Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan: Dr. Ir. Taufik Hanafi MUP (Deputi Bid. Pemantauan, Evaluasi & Pengendalian Pembangunan Bappenas) 3. Perspektif KPK Pencegahan Tindak Pidana Korupsi : Dr. Adhitya Wardono, Ak, MM 4. Perspektif Ekonomi Dalam Menjamin Perekonomian Yang Transparan: Prof. Ari Kuncoro, SE, MA, Ph.D, (Guru Besar Bid Ekonomi UI) 5. Perspektif DPD RI Mengoptimalkan Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pengawasan: H. Fachrul Razi, SIP, MIP (Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)	Moderator: Pengamat Pengawasan Keuangan Dr. Enny Sri Hartati, S.Ak, M.Si	Hotel Grand Sahid Jakarta, Puri Agung Ballroom
12.45 – 13.45	B R E A K		
13.45 – 14.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
14.30 – 14.45	Kesimpulan		
	Penutupan	Pihak Badiklat PKN / ISEI	
14.45	Pemberian Sertifikat	Pihak Badiklat PKN / ISEI	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750

Telepon (021) 79190143, 79182912, 79198741 Faksimile 79170325, 79190728

**LEMBAR KONFIRMASI KESEDIAAN MENJADI PESERTA
WORKSHOP NASIONAL DUA HARI KERJASAMA BADIKLAT PKN – ISEI**

Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No Telp/HP/Fax	:	
Alamat Email	:	

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** untuk menjadi peserta Workshop Nasional dua hari kerjasama Badiklat PKN - ISEI.

.....2021
Peserta,

- NB:**
- Batas waktu pembayaran dan konfirmasi nama peserta paling lambat tanggal 02 Juli 2021 sebelum penyelenggaraan kegiatan workshop nasional dilaksanakan.
 - Lembar konfirmasi dan tanda bukti transfer pembayaran biaya kontribusi peserta diharapkan dapat dikirim melalui Whatsapp/email untuk diverifikasi dan terdaftar dalam penetapan peserta.
 - Panitia pelaksana tidak menerima dan melayani peserta workshop yang datang ke gedung tanpa melalui mekanisme dan tidak terdaftar dalam penetapan peserta.
 - Invoice / Kwitansi asli bercap dan bermaterai diserahkan panitia bendahara di tempat registrasi peserta.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi

Panitia Workshop Nasional
SEKRETARIAT JENDERAL

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN ISEI**

Jalan Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750

Telepon (021) 79190143 Ext.1134 Faksimili (021) 79170325, 79190728

Email: badiklatpkn.isei@gmail.com

Drs. Agus Pramono, SE 0811185587 / 08111504566 (Whatsapp)

Ir. Heru Soedjatmiko, MA 0811555735





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 79190143, 79182912, 79198741 Faksimile 79170325, 79190728

KWITANSI

RECEIPT

No. : 137/WN/BDL-PKN/06/2021

Number

Sudah Terima Dari : **Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi**
Received From
Banyaknya Uang :
Amount Received

Untuk Pembayaran : () Peserta Workshop Nasional dua hari dengan biaya kontribusi setiap
In Payment Of peserta **Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Pada Hari Rabu**
- Kamis Tanggal 07 – 08 Juli 2021 Dengan Tema “ Jaring Pengaman Sosial
Dalam Penanganan Covid 19 Skema, Risiko dan Mitigasinya. Serta
Kebijakannya dan Strategi Pemeriksaan BPK.”

Rp.

Jakarta, 04 Juni 2021

Catatan :

- Pembayaran biaya kontribusi peserta ditransfer ke rekening :
BRI Kantor Cabang TMII Jakarta
A/C 139 501 003 473 506
a.n Rahmansyah SE Bendahara Panitia Badiklat PKN - ISEI**
- Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui Whatsapp / Email**



Dra. Sarinah Dewi, MM
Kepala Sub Bagian Keuangan